



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN**

Tahun Sidang	: 2016 – 2017
Masa Persidangan	: V
Jenis Rapat	: <i>Friendly Talk</i>
Hari, Tanggal	: Selasa, 23 Mei 2017
Waktu	: 10.00 WIB – selesai
Tempat	: Ruang Tamu Pimpinan BKSAP DPR RI, Gedung Nusantara III Lantai 4
Acara	: 1. <i>Courtesy Call</i> BKSAP bersama Komisi I, IV dan VI DPR RI - Delegasi International Trade Committee European Parliament 2. Lain-lain
Ketua Rapat	: Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Hj. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si.
Sekretaris Rapat	: Kepala Bagian Set. Kerja Sama Bilateral, Drs. Robert J. Purba
Hadir Anggota	: 1. Dr. Hj. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si (A-432/F.PD), Ketua BKSAP DPR RI 2. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi, M. Si (A-538/F-PPP), Wakil Ketua BKSAP DPR RI 3. Charles Honoris (A-149/F-PDIP, Anggota Komisi I) 4. Edhy Prabowo, MM, MBA (A-335/F-PGerindra, Ketua Komisi IV) 5. Sudin, SE (A-139/F-PDIP, Anggota Komisi IV) 6. H. Hamdhani (A-30/F-PNasdem, Anggota Komisi IV) 7. Eriko Sotarduga (A-145/F-PDIP, Anggota Komisi VI) 8. Zulfan Linda (A-2/F-Pnasdem, Anggota Komisi VI)
Hadir Delegasi	: 1. Sajjad KARIM, Head Delegation/UK 2. Vincent GUÉREND, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia 3. Adam SZEJNFELD, Polandia 4. Pedro SILVA PEREIRA, Portugal 5. Hannu TAKKULA, Finlandia 6. Tiziana BEGHIN, Italia
Hadir Mitra Kerja	: 1. Dupito Simamora, Wk. Dubes KBRI Brussel 2. Dewi Gustina Tobing, Direktur Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Amerop, Kemlu RI 3. Rheinhard Sinaga, Fungsional Kerja Sama Ekodag RI-UEA, Kemlu RI 4. Andi Sparingga, Fungsi Ekonomi KBRI Brussel 5. Olvy Andrianta, Atase Perdagangan KBRI Brussel 6. Syamsul Bahri Siregar, Sesditjen PPI, Kemendag RI 7. Agung Wacaksono, Kasubdit Eripa, Ditjen PPI, Kemendag RI 8. Lusyana Halmiati, Kasie Uni Eropa, Ditjen PPI, Kemendag RI 9. Sari Handani, Kasie Komoditi, Dit. PPI, Kemendag RI 10. Addy PS, Kasubbid. Isu Keuangan & Investasi Kemendag RI

I. Pendahuluan

Pertemuan dibuka dengan sambutan Ketua BKSAP DPR RI **Dr. Hj. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si**, yang memperkenalkan seluruh Anggota DPR RI serta pendamping dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan yang hadir dalam rapat tersebut.

II. Kesimpulan

- Delegasi dari Parlemen Eropa yang diwakili oleh Komite Perdagangan Internasional, dengan ketua delegasi **Mr. Sajjad Karim** memperkenalkan seluruh anggota delegasi. Mr. Karim menyampaikan tujuan kedatangan delegasi pada hari itu yakni sebagai *exploratory visit* yang kemudian akan memberikan arahan strategis dalam peningkatan hubungan Indonesia dan Uni Eropa ke depannya. Indonesia merupakan negara yang penting bagi Uni Eropa. Indonesia juga merupakan negara yang menjadi pemain penting di kawasan ASEAN.
- Ketua BKSAP menanggapi pernyataan ketua delegasi dengan mengucapkan pernyataan bela sungkawa untuk serangan bom bunuh diri yang terjadi di Manchester, Inggris. Hal tersebut merupakan hal yang biadab dan sangat keji. Ketua Delegasi INTA mengucapkan terima kasih atas ungkapan bela sungkawa tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa Manchester merupakan daerah konstituennya sehingga kejadian ini tentu saja membuat banyak orang sangat terpukul.
- Ketua BKSAP menjelaskan bahwa anggota DPR merupakan merepresentasikan rakyat. Pertemuan tatap muka seperti yang dilakukan saat ini merupakan hal yang penting untuk terus dilakukan, walaupun perkembangan teknologi saat ini sudah sedemikian pesatnya. Indonesia dan Uni Eropa sendiri telah memiliki grup persahabatan bilateral, di mana ketuanya adalah Ketua BKSAP. Ketua BKSAP berharap ke depannya proses komunikasi politik yang lebih intens dapat dilakukan melalui grup persahabatan bilateral tersebut. Ketua BKSAP juga menjelaskan bahwa Indonesia adalah kontributor terbesar bagi ekonomi ASEAN, sebesar 60% ekonomi ASEAN berasal dari Indonesia. Wilayah Indonesia sendiri mencakup 1/3 wilayah ASEAN dan penduduk Indonesia berjumlah 250 juta orang.
- Ketua BKSAP mengungkapkan penyesalannya terkait resolusi Parlemen Uni Eropa yang terbaru mengenai kelapa sawit. Resolusi tersebut merupakan sebuah mimpi buruk bagi Indonesia. Sekitar 5,3 juta rakyat Indonesia menggantungkan hidupnya langsung dari industri kelapa sawit. Indonesia selama ini dikenal sebagai negara yang aktif memperjuangkan isu lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Indonesia sendiri terlibat menjadi tuan rumah penyelenggaraan COP UNFCCC di Bali yang menghasilkan Bali Roadmap. Selain itu, mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menjadi salah satu co-chair penyusunan agenda pembangunan Pasca 2015 bersama Perdana Menteri Inggris, David Cameron. Ketua BKSAP menekankan bahwa parlemen memiliki peran penting dalam pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs). DPR RI saat ini sedang menyusun regulasi terkait perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan (*sustainable palm oil plantation*).

Ketua BKSAP mengapresiasi kedatangan Anggota Parlemen Uni Eropa yang melihat langsung aktivitas di perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia.

- Selanjutnya, Ketua Komisi IV, **Edhy Prabowo** menyampaikan selamat datang kepada anggota delegasi Parlemen Uni Eropa ke rumah rakyat. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi IV yang membawahi bidang pertanian, perikanan, kehutanan dan pangan, memberikan pandangan terkait isu kelapa sawit. Resolusi Uni Eropa tersebut sangat membuat DPR RI terpukul, sebab selama ini hubungan DPR RI dengan parlemen negara lain termasuk parlemen Uni Eropa sangat baik dan terbuka. Ketua Komisi IV menyampaikan bahwa Indonesia juga sangat terbuka dengan negara lain, termasuk dengan LSM asing. Bahkan beberapa LSM juga ada yang berkantor di gedung DPR. Ketua Komisi IV berharap adanya komunikasi yang intensif dan terbuka oleh parlemen Uni Eropa ke pihak DPR RI dalam kerangka *parliament-to-parliament* sebelum membawa isu tersebut hingga pada tahap resolusi.
- Ketua Komisi IV mengatakan bahwa resolusi yang dikeluarkan Parlemen Uni Eropa ini menjadi aneh, sebab kelapa sawit merupakan industri yang secara strategis menunjang keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Kurang lebih sebanyak 50% pelaku bisnis kelapa sawit adalah perusahaan-perusahaan terkemuka yang tentu saja tidak akan mempertaruhkan reputasinya demi kelancaran bisnis. Selain itu, kurang lebih sekitar 40% perkebunan kelapa sawit dikuasai oleh petani kecil. Dengan total sebesar 10,6 juta hektar lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, perkebunan kelapa sawit memberikan kesempatan kerja yang sangat besar bagi rakyat. Ketua Komisi IV bertanya apa dasar Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi tersebut dan sudah sejauh mana tahapan dari pelaksanaan resolusi tersebut?
- Ketua Delegasi Parlemen Uni Eropa memberikan ucapan terima kasih atas sambutan hangat yang disampaikan oleh Ketua Komisi IV dan Ketua BKSAP. Tujuan Parlemen Uni Eropa datang ke DPR RI adalah untuk membangun hubungan yang konstruktif dan intensif terkait permasalahan kelapa sawit di Indonesia. Parlemen Uni Eropa sudah melihat posisi dan pendekatan yang dilakukan oleh DPR RI terkait isu tersebut. Ketua Delegasi Parlemen Uni Eropa menyampaikan bahwa Parlemen Eropa dan DPR RI membawa nilai-nilai dan prinsip dasar yang sama. Ketua Delegasi menjelaskan bahwa parlemen Uni Eropa pada hari sebelumnya telah melakukan kunjungan ke perkebunan kelapa sawit di Pekanbaru untuk melihat langsung aktivitas perkebunan di sana. Delegasi berkesempatan untuk melihat langsung kehidupan para petani kecil di perkebunan kelapa sawit di sana.
- Parlemen Uni Eropa menyadari bahwa kelapa sawit merupakan salah satu industri strategis di Indonesia yang melibatkan beragam *stakeholder* mulai dari perusahaan besar hingga petani kecil. Industri ini juga merupakan sektor industri yang sangat beragam. Indonesia merupakan produsen terbesar minyak kelapa sawit (*crude palm oil*) sementara Uni Eropa merupakan salah satu importir terbesar kelapa sawit. Secara prinsip, Indonesia dan Uni Eropa sama-sama meyakini praktek industri kelapa sawit yang berkelanjutan. Sebagai perwakilan rakyat, setiap keputusan yang diambil oleh Parlemen Uni Eropa juga mencerminkan aspirasi rakyat Uni Eropa khususnya terkait prinsip keberlanjutan.

- Anggota delegasi, **Ms. Tiziana Beghin** dari Italia yang bertindak sebagai *rapporteur* komite perdagangan internasional parlemen Uni Eropa untuk resolusi tersebut menekankan bahwa tugas utama dari anggota parlemen Uni Eropa adalah menyampaikan aspirasi dari para warga negara di Uni Eropa. Salah satu permasalahan yang menjadi sorotan publik di Eropa adalah terkait masalah keberlanjutan (*sustainability*). Keberlanjutan merupakan tujuan utama yang ingin dicapai lewat semua lini, termasuk di bidang perdagangan. Perdagangan di satu sisi merupakan tujuan akhir, namun di sisi lain juga dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan manfaat bagi semua termasuk untuk mencapai tujuan keberlanjutan. Resolusi Uni Eropa terkait kelapa sawit tersebut dalam hubungannya dengan para produsen kelapa sawit ditujukan untuk meminimalisir dampak negatif lingkungan yang ditimbulkan seperti deforestasi dan penggunaan cairan kimia yang berbahaya dalam proses produksi. Ms. Beghin juga mengapresiasi skema sertifikasi wajib yang telah dikeluarkan oleh Indonesia yakni ISPO. Walaupun demikian, terdapat beberapa perbedaan dalam skema sertifikasi antara Uni Eropa dan Indonesia. Resolusi tersebut menyerukan agar dibuat suatu standar sertifikasi yang sama untuk kelapa sawit.
- Resolusi parlemen Uni Eropa sendiri bukan merupakan produk legislatif yang bersifat mengikat. Resolusi tersebut merupakan sebuah saran yang akan diteruskan kepada Komisi Uni Eropa, dalam hal ini melalui komisi lingkungan, kesehatan masyarakat, pertanian dan keamanan pangan untuk selanjutnya diimplementasikan guna mengurangi dampak lingkungan pada produksi kelapa sawit. Sebetulnya resolusi tersebut tidak hanya menekankan penggunaan minyak kelapa sawit tetapi minyak-minyak yang lain termasuk *biodiesel*. Posisi Parlemen Uni Eropa sendiri saat ini ingin menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Hal ini menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh parlemen Uni Eropa agar bermanfaat untuk kedua belah pihak.
- Ketua BKSAP menanggapi pernyataan tersebut bahwa DPR RI mendukung pelaksanaan industri kelapa sawit yang berkelanjutan. Saat ini, DPR RI tengah merancang RUU Perkelapasawitan yang bertujuan untuk mengangkat kondisi sosial ekonomi para petani kecil, meregulasi sektor industri kelapa sawit nasional dari hulu ke hilir serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku perkebunan kelapa sawit. Selain itu, DPR RI juga sedang membahas RUU Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang masuk ke dalam prolegnas bersama RUU Perkelapasawitan di tahun ini. Kedua RUU tersebut bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan pada industri kelapa sawit serta mempromosikan perilaku bisnis yang bertanggung jawab pada seluruh sektor di Indonesia.
- Anggota Komisi VI, yang membawahi bidang perdagangan, industri, BUMN dan standardisasi nasional, **Eriko Sotarduga** dan **Zulfan Lindan** memberikan tanggapan atas pernyataan delegasi parlemen Uni Eropa. Eriko menjelaskan bahwa di Indonesia terdapat sekitar 12 juta hektar perkebunan kelapa sawit dengan lebih dari 4 juta pekerja yang menggantungkan hidupnya di sana. Artinya, sekitar 6-7% total pekerja yang ada di Indonesia berada di industri ini. Tentu saja dengan adanya resolusi ini berakibat bagi keberlangsungan lapangan pekerjaan di industri ini. Industri kelapa sawit sendiri dalam jangka panjang tidak akan diminati oleh para pencari kerja, sebab

jika perkebunan kelapa sawit telah melakukan penanaman kembali (*replantation*) sebanyak dua kali, hasilnya tidak akan produktif. Pemerintah Indonesia bersama DPR RI juga telah melakukan zonasi perkebunan di Indonesia. Lebih dari 50% wilayah Indonesia masih berada dalam kawasan hutan, dengan adanya pengaturan zonasi (*spatial planning*) ini tidak perlu ada kekhawatiran Indonesia akan menghilangkan hutan di Indonesia begitu saja. DPR RI berharap Parlemen Uni Eropa juga memberikan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia. Terkait isu HAM, menurut Zulfan, perlu ditekankan bahwa pekerja di perkebunan kelapa sawit terdiri dari pekerja individu dan pekerja yang membawa keluarganya. Ikutnya anak-anak mereka membantu untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit adalah keinginan sukarela yang tidak dipaksakan oleh para pengusaha dan bahkan banyak perusahaan yang tidak mengetahui hal tersebut. Indonesia sangat terbuka dengan kedatangan negara-negara lain, beberapa kepala negara Uni Eropa seperti Perancis dan Swedia bahkan sudah dan sedang berkunjung ke sini. Hubungan perdagangan kedua pihak juga semakin erat dengan negosiasi CEPA dalam kerangka bilateral dan EU-ASEAN Free Trade Agreement dalam kerangka regional, sudah seharusnya masalah-masalah terkait disampaikan langsung dan secara terbuka oleh kedua belah pihak.

- Ketua Delegasi Parlemen Uni Eropa menjelaskan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Parlemen Uni Eropa merupakan ungkapan perhatian dari warga negara yang ada di sana. Dengan mayoritas anggota parlemen menyetujui resolusi tersebut, artinya menunjukkan bahwa isu ini sangat penting dan berharap ke depannya dapat menjadi masukan untuk negosiasi perjanjian perdagangan seperti CEPA dan EU-ASEAN FTA.
- Anggota delegasi Parlemen Uni Eropa, **Hannu Takula** menjelaskan bahwa pihak parlemen Uni Eropa sangat memberikan perhatian pada negosiasi CEPA. Uni Eropa saat ini sudah menyetujui perjanjian perdagangan dengan Singapura dan Vietnam dan akan membahas perjanjian perdagangan dengan Malaysia dan Filipina. Mengenai isu kelapa sawit, Mr. Takula menanggapi bahwa harus ada negosiasi yang intensif antara Uni Eropa dan Indonesia di bawah payung CEPA. CEPA harus menjadi instrumen untuk menghapuskan segala hambatan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa, baik hambatan berupa tarif maupun hambatan yang berupa non-tarif. Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Komite urusan Kebebasan Beragama dan Kepercayaan, Mr. Takula menanyakan perkembangan yang terjadi mengenai isu kebebasan beragama di Indonesia, mengenai standar moral dan kehidupan minoritas di Indonesia. Mr. Takula menjelaskan bahwa Muslim di Eropa yang menjadi minoritas diperlakukan dengan sangat baik, bahkan terkadang ada perbedaan perlakuan khusus dengan mayoritas Kristen di sana. Mr. Takula ingin mengklarifikasi mengenai isu tersebut.
- Ketua BKSAP menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang besar dan memegang prinsip "*unity in diversity*" sejak zaman dahulu kala. Di berbagai provinsi di Indonesia, kaum minoritas dapat menjadi pemimpin seperti di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Hal itu menunjukkan bahwa kaum minoritas tidak didiskriminasi dalam hal tersebut. Khusus untuk di Jawa, mayoritas penduduknya adalah Muslim. Sementara terkait isu yang berkembang di Jakarta, hal itu lebih banyak dilatarbelakangi oleh dinamika politik. Sosial media semakin memperkeruh

suasana sebab tidak semua yang diberitakan di sosial media sesuai dengan kenyataan. Dengan demikian tidak benar bahwa isu kebebasan beragama di Indonesia menjadi semakin kecil, bahkan Indonesia tetap menjaga keharmonisan antar umat beragama serta menghargai para pemeluk agama satu sama lain.

- Anggota Delegasi Parlemen Uni Eropa, **Adam Sjenfield** mengungkapkan keinginan untuk berdiskusi secara terbuka dan *open mind*. Prinsip *open mind* ini harus dibangun dalam negosiasi dan pembahasan di semua sektor termasuk pertanian dan pembangunan berkelanjutan di bidang pertanian. Mr. Sjenfield meyakini bahwa prinsip *open mind* yang dibawa oleh Indonesia dan Uni Eropa akan membawa banyak manfaat bagi perkembangan hubungan bilateral di masa yang akan datang.
- Ketua Delegasi Parlemen Uni Eropa selanjutnya bertanya mengenai ekspektasi DPR RI terhadap negosiasi perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa. Apa yang menjadi tujuan Indonesia dan sektor-sektor apa saja yang menjadi perhatian dari DPR RI?
- Ketua Komisi IV menjelaskan bahwa isu penting yang menjadi fokus pertemuan pada hari ini adalah bagaimana membangun pangan dan pertanian di Indonesia khususnya kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Mengenai hal tersebut, Parlemen Uni Eropa dan DPR RI sudah sepakat dengan isu ini. Mengenai negosiasi perdagangan tentu saja tidak dapat dibahas secara tuntas pada pertemuan kali ini, perlu ada pertemuan lebih lanjut untuk membahas perhatian DPR RI dalam perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa. Ketua Komisi IV menekankan perlunya komunikasi yang lebih intens terkait isu kelapa sawit di Indonesia. Ketua Komisi IV juga bertanya bagaimana proses pengambilan keputusan dalam pembuatan resolusi ini? Adakah jalan untuk “menggagalkan” berlakunya resolusi ini? Apakah resolusi tersebut sifatnya sementara dan belum final?
- Anggota delegasi Parlemen Uni Eropa, **Mr. Pedro Silva Pereira** menjelaskan bahwa isu pertanian merupakan isu yang sangat sensitif. Agenda pertemuan hari itu sebenarnya jauh melampaui isu kelapa sawit. Kunjungan delegasi Parlemen Uni Eropa, khususnya dari komite perdagangan internasional adalah untuk menyamakan kondisi yang ideal bagi perdagangan kedua belah pihak khususnya dalam menghapus hambatan perdagangan baik tarif maupun hambatan non-tarif. Keterbukaan merupakan kunci bagi pelaksanaan perjanjian perdagangan dengan Indonesia termasuk di dalamnya memastikan terlaksananya *public procurement* yang terbuka dan transparan. Perjanjian perdagangan generasi baru tentu saja akan memperhatikan tujuan keberlanjutan di masa yang akan datang. Mengenai proses adopsi resolusi, Parlemen Uni Eropa setelah menyetujui suatu resolusi akan meneruskannya kepada pihak Komisi Uni Eropa untuk tindak lanjut. Hal ini merupakan konsekuensi dari tanggung jawab bersama untuk keberlanjutan industri kelapa sawit di Indonesia. Tujuan dari resolusi ini adalah untuk membuat produksi kelapa sawit yang berkelanjutan. Masalah sertifikasi yang menjadikunci dari pelaksanaan industri kelapa sawit yang berkelanjutan. Kata kunci di sini adalah *sustainability* untuk kepentingan bersama. Mr. Pedro juga mengapresiasi proses negosiasi Indonesia-EU CEPA yang telah masuk ke putaran kedua.

- Ketua Delegasi Parlemen Uni Eropa menjelaskan bahwa pertemuan kali ini sekali lagi menjadi ajang untuk meningkatkan komunikasi yang intens dan konstruktif di antara kedua belah pihak. Pertemuan kali ini juga dijadikan sebagai panduan untuk kerjasama ke depannya. Resolusi Parlemen Uni Eropa adalah keputusan yang bersifat tidak mengikat dan bukan merupakan produk legislasi. Namun, Parlemen Uni Eropa memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak perjanjian perdagangan termasuk CEPA. Proses tersebut membutuhkan beberapa pertimbangan termasuk negosiasi terkait sektor kelapa sawit.
- Ketua BKSAP kemudian menekankan bahwa sebagai negara muslim terbesar di dunia dan negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, Indonesia menjunjung tinggi prinsip perdagangan yang bebas dan berkeadilan. Ketua BKSAP sangat senang Parlemen Uni Eropa dapat melihat secara langsung keberadaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, sebab “*seeing is believing*”. DPR RI akan berupaya untuk terus memperbaiki, mempelajari dan berusaha terus menjamin keberlanjutan industri kelapa sawit di Indonesia.
- Dalam kesempatan kali itu, Ketua BKSAP juga mengapresiasi sistem sertifikasi standar yang dikeluarkan oleh Uni Eropa dalam hal produksi kayu, yakni FLEGT. Ketua BKSAP berharap Uni Eropa dapat melanjutkan kerjasama di bidang ini dan memperluas kerjasama seperti ini untuk sektor lain, termasuk kelapa sawit. Kerjasama yang lebih erat tidak hanya dapat dilakukan melalui perjanjian perdagangan, tetapi juga melalui peningkatan kapasitas (*capacity building*) antara Uni Eropa dan Indonesia.

III. Penutup

Menutup pertemuan hari itu, Ketua BKSAP menjelaskan bahwa BKSAP memiliki Panitia Kerja khusus isu-isu pembangunan berkelanjutan (SDGs). Panja SDGs salah satunya akan mengadakan pertemuan *World Parliamentary Forum on Sustainable Development* (WPFSD) yang akan diadakan di Bali pada bulan September 2017. Ketua BKSAP mengundang anggota Parlemen Uni Eropa untuk hadir pada acara tersebut. Di akhir pertemuan, Ketua BKSAP berharap Parlemen Uni Eropa dapat memaksimalkan komunikasi antar parlemen mekanisme bilateral antar parlemen yang sudah ada, yakni grup persahabatan bilateral parlemen Indonesia-Uni Eropa. Ketua BKSAP sendiri sudah bertemu dengan ketua dan anggota grup persahabatan di Brussel pada bulan Maret 2017 lalu.

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,



Drs. Robert Juheng Purba
NIP. 19620703 199203 1 002